

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

Perkembangan Inflasi di Kabupaten Buleleng pada triwulan III Tahun 2025 adalah

sebagai berikut :

No	Bulan	Prosentase	Keterangan
1	Juli	0,42%	Inflasi
2	Agustus	-0,56%	Deflasi
3	September	-0,06%	Deflasi

◦ Pada bulan Juli 2025 Kota Singaraja tercatat mengalami Inflasi *month to month (m to m)* setinggi 0,42%, pada juli 2025 terjadi inflasi *year on year (y-on-y)* Singaraja sebesar 3,10% dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 109,50.

Sementara komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi m-to-m pada Juli 2025, antara lain: beras, bawang merah, tomat, cabai rawit, sigaret putih mesin (SPM), kangkung, bimbingan belajar, telur ayam ras, jeruk, ikan tongkol/ikan ambu-ambu, tongkol diawetkan, bensin, sigaret kretek tangan (SKT), ikan teri, seragam sekolah wanita, detergen cair, sigaret kretek mesin (SKM), pasir, ikan kembung/ikan gembung, dan hand body lotion.

- Pada bulan Agustus 2025 Kota Singaraja tercatat mengalami deflasi *month to month (m to m)* setinggi 0,56%, pada agustus 2025 terjadi inflasi *year on year (y-on-y)* Singaraja sebesar 2,71%, dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 108,89.

Sementara komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan deflasi m-to-m pada Agustus 2025, antara lain: tomat, cabai rawit, ikan tongkol/ikan ambu-ambu, bayam, kangkung, tongkol diawetkan, labu siam/jipang, daun seledri, daging babi, buncis, ikan teri, salak, ketimun, apel, bensin, terong, ayam hidup, sabun detergen bubuk, detergen cair, dan cumi-cumi.

- Pada bulan September 2025 Kota Singaraja tercatat mengalami deflasi secara *month to month (m to m)* setinggi 0,06%, pada september 2025 terjadi inflasi *year on year (y-on-y)* Singaraja sebesar 3,39% dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 108,82.

Sementara komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan deflasi m-to-m pada September 2025, antara lain: bawang merah, tomat, daging babi, bahan bakar rumah tangga, telepon seluler, jagung manis, tongkol diawetkan, cabai rawit, telur ayam ras, bawang putih, kacang panjang, terong, sabun detergen bubuk, bawang bombay, daun seledri, dan minyak goreng.

- Akumulasi Persentase Perubahan Indeks Harga konsumen pada Bulan September 2025 terhadap Indeks Harga Konsumen Bulan Desember 2024, terjadi Inflasi sebesar 1,04%.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

Identifikasi Permasalahan Pengendalian Inflasi di Kabupaten Buleleng pada Triwulan III Tahun

2025 adalah sebagai berikut :

1. Fluktuasi harga komoditas pangan di Kabupaten Buleleng masih tinggi seperti beras, bawang merah, bawang putih, cabai rawit merah, cabai besar, daging ayam ras dan telur ayam ras.
 2. Distribusi dan rantai pasokan tidak optimal disebabkan karena hasil panen cabai rawit sebagian dijual ke luar kabupaten, sehingga pasokan lokal berkurang.
 3. Musim Kemarau dan faktor cuaca yang menyebabkan gangguan produksi hortikultura, resiko serangan OPT dan gangguan produksi lainnya.
 4. Pengaruh momen hari Raya/Agama, Upacara Manusa/Dewa Yadnya terhadap permintaan menyebabkan permintaan pangan meningkat drastis, yang dapat memicu lonjakan harga jika pasokan berkurang.
 5. Kurangnya personil di Perumda Pasar dalam Pelaksanaan Operasi Pasar Murah.
 6. Belum terealisasinya bantuan Biaya Buruh dan Transportasi untuk membantu meringankan biaya operasional serta mendukung kelancaran distribusi.
 7. Tidak mendapatkan supply barang khususnya beras SPHP dari Bulog di Bulan Juli dan Agustus 2025.
 8. Masih minimnya stock cadangan pangan di Kabupaten Buleleng utamanya Beras saat menghadapi musim kerte masa/musim tanam. Sehingga terjadinya lonjakan harga Beras.
 9. Masih minimnya produksi telur ayam di Kabupaten Buleleng, khususnya peternak di Kabupaten Buleleng sehingga masih membutuhkan pasokan telur ayam dari luar Kabupaten Buleleng.
 10. Kurangnya Masyarakat Buleleng untuk mengkonsumsi komoditas pangan lokal.
 1. Perubahan fungsi lahan pertanian menjadi lahan
 2. Durabilitas komoditas pangan tertentu (hortikultura) yang tidak tahan
3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Pelaksanaan Kebijakan Pengendalian Inflasi di Kabupaten Buleleng pada Triwulan III tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Untuk menjaga lonjakan harga barang khususnya beras disaat produksi petani menurun maka Perumda Swatantra melakukan penyerapan secara optimal baik di dalam kabupaten Buleleng maupun diluar Kabupaten Buleleng dengan melakukan kerja sama antar perumda yang ada di kabupaten buleleng ,maupun yang di luar Kabupaten Buleleng sebagai penghasil beras.
2. Untuk menjaga stabilisasi harga minyak goreng Perumda Swatantra melakukan kerja sama dan menerima pasokan Dari PT GIEB , Toko ADHITAMA SUWELA dan akan mengupayakan distributor besar khususnya minyak goreng agar bisa memberikan harga lebih terjangkau ke Masyarakat.
3. Untuk menjaga stabilisasi harga telur maka Perumda Swatantra mengutamakan secara penuh penyerapan produksi telur Khususnya Petani Telur di Kabupaten Buleleng seperti, Peternak UD. PARAS FARM, UD. BAYU UTAMA, JERO REDIASA TAJUN.
4. Kerja sama juga dilakukan dengan perum bulog bali khususnya pasokan beras premium beras SPHP dan minyakita akan tetapi di tahun pada bulan agustus - Oktober 2025 perum bulog belum mengeluarkan produk untuk pasokan ke perumda Swatantra.
5. Untuk pasokan bawang Merah kita menyerap dari Petani Buleleng baik dari Petani di kecamatan bungkulun maupun Petani di kecamatan gerokgak.
6. Mengajukan dana BTT untuk menunjang kebutuhan dana transportasi pengangkutan produk pangan sehingga harga pangan bisa dikendalikan di pasar.

Ketersediaan pasokan Pengembangan Kawasan Hortikultura.

- 7.
8. Ketersediaan pasokan Penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani.
9. Pengelolaan Produksi Tanaman Sereal.
10. Bantuan Budidaya Padi Kaya Gizi (Biofortifikasi).
11. Pengembangan Kawasan Hortikultura.
12. Gerakan Tanam Cabai Rawit Merah
13. Melaksanakan Sidak Pasar.
14. Pemantauan Harga dan Stok Pangan.
15. Pemantauan Alur Distribusi Pangan.
16. Keterjangkauan harga dengan Melaksanakan Operasi Pasar.
17. Optimalisasi peran perumda sebagai off-taker untuk melakukan pembelian langsung produk hortikultura ke petani dan penjualan kepada pedagang pasar.
18. Pemantauan arus barang masuk dan barang keluar dari Bali.
19. Monitoring persediaan dan harga secara intensif.
20. Peningkatan kerja sama antar Lembaga baik di pusat maupun daerah.

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Evaluasi Kebijakan Pengendalian Inflasi di Kabupaten Buleleng pada Triwulan III tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Operasi Pasar Murah kurang memberikan dampak yang signifikan untuk pengendalian inflasi dan hanya bersifat jangka pendek, perlu adanya upaya jangka panjang dalam pengendalian Inflasi karena kondisi ini terus berlangsung tiap tahunnya.
2. Melakukan pemantauan harga dan ketersediaan stok secara intensif, khususnya menjelang hari besar keagamaan dan momen kenaikan permintaan, serta menyiapkan Langkah antisipatif seperti Pelaksanaan GPM (Gerakan Pangan Murah) dan Operasi Pasar.
3. Memastikan Rantai Pasok berjalan dengan baik.
4. Peningkatan produksi komoditas pemicu inflasi.
5. Pengamanan ketersediaan dan pasokan.
6. Intensitas Yang berkesinambungan dalam pemantauan harga, stok di Petani dan Pengepul.
7. Ketersediaan anggaran untuk kegiatan gerakan tanam.
8. Memberikan sosialisasi tata Kelola pupuk bersubsidi terbaru kepada petani.
9. Pengamanan Harga dan Stok Pangan.
10. Sosialisasi Kenyang tidak harus makan nasi.
11. Mengintensifkan pelaksanaan pasar murah ke berbagai titik di Kabupaten Buleleng terutama saat menjelang hari raya Keagamaan.
12. Beras, bawang merah, minyak goreng dan daging babi menjadi komoditas yang mengalami kenaikan harga, sehingga perlu ada upaya-upaya (intervensi) dari segi penyediaan komoditas dan pendistribusian.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Inflasi di Kabupaten Buleleng pada Triwulan III tahun

2025 adalah sebagai berikut :

1. Ketersediaan Anggaran Biaya Subsidi yang memadai Pemerintah daerah perlu menyediakan anggaran subsidi yang memadai sebagai Upaya untuk menekan kenaikan harga bahan pokok yang dapat memicu inflasi daerah.
2. Memperkuat ketersediaan dan pasokan pangan khususnya produk cabai dengan menambah sentra produksi di daerah.
3. Peningkatan akses pembiayaan bagi petani/memberikan bantuan subsidi untuk biaya produksi bagi para petani sehingga mendukung peningkatan produksi pasokan pangan di Daerah.
4. Kerjasama petani/kelompok tani dengan Perumda Swatantra dan Pasar Argha Nayotama terkait pembelian hasil panen petani.
5. Ketersediaan anggaran untuk kegiatan gerakan tanam.
6. Menjaga Konsistensi koordinasi dalam penanganan Inflasi dengan Dinas atau instansi terkait.
7. Program Kemitraan dengan pihak produsen atau petani.
8. Ketersediaan Anggaran Biaya yang memadai, untuk subsidi komoditas yang mempengaruhi Inflasi Daerah.
9. Perlu untuk terus melakukan pembinaan serta pengawasan untuk memastikan lancarnya distribusi pupuk hingga diterima oleh petani.
10. Tersedianya anggaran Sosialisasi Kenyang Tidak Harus makan nasi dan Diversifikasi Pangan.
11. Perangkat Daerah dan stakeholder perlu melakukan intervensi terhadap fenomena kenaikan harga beras, bawang merah, cabai rawit dan daging babi yang berkepanjangan. Perlu sinergi antara anggota TPID Provinsi agar Upaya-upaya yang dilakukan efektif dan berdampak.
12. Mendorong implementasi sistem informasi pengendalian angkutan barang/logistik terintegrasi untuk pemantauan arus distribusi agar dapat berjalan baik.
13. Perlu dipercepatnya kegiatan/pembangunan infrastruktur yang mempengaruhi stabilitas harga pangan.
14. Menjaga konsistensi koordinasi dalam penanganan inflasi dengan instansi terkait.
15. Melaksanakan pelatihan olahan pangan lokal.